Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng

Hj. Nurmilasari^{1*}, Rusliandi², Hj. A. Nurhidayati³ Puji Rahma⁴ Asnia Minarti⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Universitas Lamappapoleonro

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu data realisasi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, dan kualitatif yaitu dalam menganalisis perlakuan akuntansi dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pajak bumi dan bangunan pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, Serta penyajian informasi tentang realisasi pajak bumi dan bangunan. Sedangkan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten Soppeng yaitu dari tahap pendaftaran, tahap pengisian surat pemberitahuan objek pajak, tahap pemberitahuan pajak terutang, tahap pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta tata cara pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membayar ke tugas pemungut dan bank persepsi yang telah di tentukan oleh badan pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah kabupaten Soppeng.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Prosedur Pajak Bumi Dan Bangunan.

Copyright (c) 2022 Hj. Nurmilasari

✉ Corresponding author :

Email Address : nurmilasarii088@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membayar pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2011:1) sebagaimana yang dikutip oleh Ikhsanuddin (2017), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/ kota maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang cukup besar salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

“Pemungutan pajak ada dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Yang termasuk pajak tidak langsung adalah seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan yang termasuk ke dalam pemungutan pajak langsung adalah seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan”. Menurut Mardiasmo (2008:5).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

METODELOGI

Metode Penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Jangka waktu pengambilan data yaitu 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Juli s.d Agustus 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Soppeng yang beralokasi di Jl. Salotungo No. 03, Watansoppeng, Sulawesi Selatan.

HASIL PENELITIAN

Perlakuan Akuntansi dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Perlakuan akuntansi ada 3 yaitu:

Pengakuan

Akuntansi, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dapat di klasifikasikan sebagai beban bagi perusahaan/perorangan yang mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan diakui sebagai beban ketika wajib pajak menerima SPPT/SKP/STP.

Pencatatan

Berikut contoh pencatatan akuntansi berdasarkan peraturan daerah kabupaten Soppeng No. 3 tahun 2012 ayat 3 pasal 51 adalah:

“Nilai Jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan tarif Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa : **a).** Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000,00 / m². **b).** Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp.350.000,00 / m². **c).** Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,00 / m². **d).** Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,00 / m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut : **1).** NJOP Bumi : 800 x Rp.300.000,00 =Rp.240.000.000,00 **2).** NJOP Bangunan terdiri dari : **a).** Rumah dan garasi 400xRp.350.000,00= Rp.140.000.000,00 **b).** Taman 200 x Rp.50.000,00 = Rp. 10.000.000,00 **c).** Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000,00 = Rp. 31.500.000,00 + Total NJOP Bangunan Rp.181.500.000,00 + Total NJOP Bumi + Bangunan Rp.421.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 **3).** Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00 **4).** Tarif Pajak Efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%. **5).** PBB Terutang = 0,2 % x Rp. 411.500.000,00 = Rp. 823.000,00”

Penyajian

Berdasarkan contoh di atas maka jurnalnya dapat disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut: **1).** Saat BPKPD mengeluarkan SPPT kepada wajib pajak **2).** saat menerima pembayaran atas PBB **3).** untuk penysetoran **4).** Jurnal pencatatan saat pembayaran PBB telah dilakukan 5 Juni 2020.

Cara mengetahui seberapa baik realisasi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD dapat menggunakan rumus rasio Efektivitas. Perlu diketahui menurut Mahmudi (2016:142) “Rasio Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%”.

Adapun Rumus dari rasio efektivitas pemungutan PBB.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100 \%$$

Contohnya :

Kecamatan Marioriwawo

1,224,515,325.00

Efektivitas = _____ X100% =101.40%

1,207,576,237.00

Kecamatan Liliriaja

920,147,300.00

$$\text{Efektivitas} = \frac{\quad}{888,895,258.00} \times 100\% = 103,52\%$$

Kecamatan Lilirilau

$$\text{Efektivitas} = \frac{1,120,914,396,00}{1,152,792,227.0} \times 100\% = 97,23\%$$

Kecamatan Lalabata

$$\text{Efektivitas} = \frac{1,738,813,771,00}{1,795,495,174.00} \times 100\% = 96,84\%$$

Kecamatan Marioriawa

$$\text{Efektivitas} = \frac{724,530,791.00}{725,553,456.00} \times 100\% = 99,86\%$$

Kecamatan Donri-Donri

$$\text{Efektivitas} = \frac{728,702,730.00}{703,931,762.00} \times 100\% = 103,52\%$$

Kecamatan Citta

$$\text{Efektivitas} = \frac{219.254,121.00}{212,015,697.00} \times 100\% = 103,41\%$$

SIMPULAN

Wajib pajak bisa membayar pajak bumi dan bangunan terutang nya ke bank yang telah ditetapkan oleh badan pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah kabupaten Soppeng yaitu bank sulsesbar dan bri . Kedua yaitu pembayaran melalui tugas pemungut dalam hal ini ketua RT/RW atau dusun setempat, dan wajib pajak akan menerima surat tanda terima setoran kemudian petugas pemungut memasukkan penerimaan tersebut kedalam daftar penerimaan harian(DPH) pajak bumi dan Bangunan lalu disetorkan ke bank yang telah di tetapkan badan pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah kabupaten Soppeng selambat-lambatnya delapan hari setelah wajib pajak menerima surat tanda terima setoran.

Referensi :

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustine, Yvonne. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erly, Suandy. 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Halim. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor.
- Rochmat, Soemitro. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco
- Rasto. 2015. Manajemen Perkantoran Paradigma Baru. Cetakan Kesatu. Bandung: ALFABETA.
- Siti, Resmi. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 7. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Umar, Husein. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi ke 2-12. Jakarta: Rajawali Pers.